

Kebijakan Kepala Sekolah dalam Pendidikan Inklusif di SMA Muhammadiyah 2 Palembang

Novia Nurhayati¹, Tiara Lestari², Indah Wigati³, Yuniar⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

E-mail: nurhayatinovia052@gmail.com ¹

Article History:

Received: 08 Desember 2024

Revised: 01 Maret 2025

Accepted: 09 Maret 2025

Keywords: Kebijakan Kepala Sekolah, Pendidikan Inklusif

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kepala sekolah terkait pelaksanaan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik triangulasi, yang melibatkan observasi untuk mempelajari lingkungan penelitian, wawancara dengan informan yang relevan, serta dokumentasi hasil penelitian lapangan, dengan menggunakan teori Miles dan Huberman. Fokus utama penelitian ini adalah kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Program pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 2 Palembang dimulai pada tahun ajaran 2022 dan masih berlangsung hingga saat ini. Saat ini, terdapat 11 siswa inklusif di sekolah tersebut, dengan beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan inklusif, seperti terbatasnya jumlah tenaga pendidik, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kekurangan sarana dan prasarana yang memadai.

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif adalah suatu metode pengajaran yang efektif dan dapat memperbaiki kesejahteraan manusia. Pendekatan ini juga menyebabkan meningkatnya tekanan dari teman sebaya terkait dengan keberagaman atau perbedaan. Konsep penyamaan dan seragam kini sudah tidak relevan lagi. Perbedaan kini dilihat bukan sebagai penyimpangan, tetapi sebagai sumber kekayaan yang layak dihargai. (Khairuddin, 2020) Pendidikan inklusif mencakup peserta didik yang sangat beragam. Menurut Stainback dan Stainback (1990:73), sekolah inklusif adalah sekolah yang menerima semua peserta didik dalam satu kelas. Sekolah ini menawarkan program pendidikan yang bersifat mendidik, adaptif, serta sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Selain itu, sekolah ini menyediakan bimbingan dan dukungan dari guru untuk membantu anak-anak mencapai keberhasilan. Lebih dari itu, sekolah juga berfungsi sebagai tempat di mana setiap anak dapat dididik, berperan sebagai bagian dari komunitas sekolah, dan yang terpenting, mendukung guru, peserta didik, serta anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan setiap individu dapat terpenuhi.

Pendidikan inklusif adalah jenis pendidikan yang menganggap setiap anak sebagai peserta didik yang layak diajarkan di sekolah reguler, tanpa membedakan perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau perbedaan lainnya. Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada

upaya menciptakan lingkungan sosial yang dapat mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat dengan partisipasi penuh, daripada memandang perbedaan sebagai sebuah tragedi pribadi.(Phytanza et al., 2023) Terdapat perbedaan yang jelas antara guru umum dan guru spesialis dalam pendidikan inklusif. Guru dituntut untuk mengajar setiap anak sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, sekaligus mampu berinteraksi dengan mereka dalam lingkungan kelas yang menantang. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif mengatasi keterbatasan yang ada pada pendidikan tradisional, yang biasanya memberikan materi yang seragam kepada semua siswa dalam satu kelas, dan beralih menjadi lebih fleksibel serta bersifat individual untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anak..(Phytanza et al., 2023)

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan di SMA Muhammadiyah 2 Palembang, yang menunjukkan bahwa sekolah tersebut telah menerapkan pendidikan inklusif sejak tahun 2022. Hingga Oktober 2024, jumlah siswa inklusif di sekolah tersebut adalah sebelas orang. Meskipun demikian, pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi beberapa masalah, di antaranya rendahnya partisipasi siswa dalam program, rendahnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, serta lemahnya manajemen, pemantauan, dan evaluasi oleh pihak sekolah terkait metode pembelajaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti data yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh prosedur statistik atau perhitungan. Menurut Monique Henink, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan memberikan informasi mendalam kepada peneliti mengenai suatu peristiwa dengan menggunakan berbagai metode, seperti observasi, analisis mendalam, penelitian virtual, serta penelitian biografi atau historis. . (Comas Gatot Haryono, 2020) Menurut Meleong, mendeskripsikan subyek penelitian sebagai informan, maksudnya yaitu orang yang menyampaikan informasi atau keterangan tentang suatu keadaan, situasi dan kondisi tempat penelitian. (Nashrullah et al., 2023) Dalam penelitian ini, subjek utamanya adalah kepala sekolah, yang berperan sebagai pembuat kebijakan sekolah. Selain itu, peneliti juga melibatkan subjek pendukung, seperti guru dan siswa inklusif, yang memberikan informasi mengenai lingkungan mereka di SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Creswell (2009) menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan- pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data 3 yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Khoironi, 2019).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang terkait dengan penelitian, dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan perhatiannya. Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh tentang masalah yang diangkat dan informasi lain dari responden secara jelas dan ringkas, serta jumlah responden yang diteliti. (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala sekolah memiliki kewenangan dalam menentukan penerimaan siswa baru, termasuk menerima atau menolak calon siswa, terutama jika jumlah pendaftar anak berkebutuhan khusus melebihi kapasitas. Dalam kebijakannya, kepala sekolah melibatkan koordinator pendidikan inklusif untuk membantu proses seleksi siswa dengan hambatan belajar, didukung

oleh guru-guru yang melakukan asesmen terhadap anak. Terkait keberadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK), meskipun sudah ada, saat ini belum tersedia guru dengan latar belakang pendidikan khusus secara spesifik. Oleh karena itu, kepala sekolah menetapkan kebijakan yang memungkinkan guru pendamping atau guru mata pelajaran untuk membantu selama ujian berlangsung. Kebijakan ini bertujuan mempermudah guru dalam menilai hasil ujian siswa.

Peran kepala sekolah dalam menetapkan kebijakan terkait kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus mencakup penyusunan kurikulum yang fleksibel, selaras dengan kurikulum umum, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan individu siswa. Untuk kelas 10 dan 11, diterapkan Kurikulum Merdeka sesuai kebijakan pemerintah, sementara siswa kelas 12 masih menggunakan Kurikulum 2013. Penyusunan program pembelajaran dan evaluasi dilakukan secara kolaboratif dengan orang tua siswa, serta memberikan kebebasan kepada guru untuk memberikan bimbingan atau pelajaran tambahan di luar jam sekolah.

Penggunaan alat dan media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus masih menggunakan media yang ada disekitar sekolah. Dalam hal ini untuk alat dan media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus masih belum memadai guna menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan bantuan semua pihak baik sekolah, guru dan orang tua anak berkebutuhan khusus, kemudian dari hasil wawancara di atas peneliti menemukan hambatan yang dialami oleh pihak sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu anggaran sekolah yang minim sehingga pihak sekolah dalam pengelolaan anggaran sekolah tersebut harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan yang diprioritaskan oleh sekolah.

Sistem pembelajaran pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 2 Palembang yaitu menggunakan RPP umum. Pelaksanaan pembelajaran di kelas ini dilakukan oleh guru kelas langsung dikarenakan SMA Muhammadiyah 2 Palembang ini tidak memiliki guru pendamping khusus jadi guru kelas yang merangkap jadi guru pendamping khusus bagi anak berkebutuhan khusus.

Dalam konteks pengaturan pembelajaran inklusif, kepala sekolah memberikan keleluasaan kepada guru untuk mengatur kondisi ruang kelas agar nyaman dan aman, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa. Selain itu, kepala sekolah mendorong guru untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi, guna menghindari kebosanan dan kejenuhan siswa. Pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 2 Palembang Dukungan menyeluruh dari seluruh komunitas sekolah dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan inklusif mendorong kepala sekolah untuk memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaannya di SMA Muhammadiyah 2 Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat beberapa faktor pendukung dalam penerapan pendidikan inklusif, salah satunya adalah tingginya sikap penerimaan dari kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap berbagai perbedaan yang ada. *Pertama*, sikap penerimaan ini menjadi fondasi utama keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Semua pihak, termasuk kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa, menunjukkan sikap terbuka dan menghargai keragaman di antara peserta didik. Tidak ditemukan adanya perlakuan diskriminatif terhadap siswa berkebutuhan khusus. Seluruh warga sekolah berkomitmen untuk menghormati dan menerima perbedaan tersebut. Hal ini sesuai dengan karakteristik sekolah inklusif sebagaimana dijelaskan oleh Tarsidi et al. (2008), yakni tidak bersifat diskriminatif. (Taufan & Mazhud, 2016)

Setiap anak berbeda, dan perbedaan tersebut menjadi kekuatan untuk mengembangkan

potensinya. Kunci utama yang prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah bahwa semua anak tanpa terkecuali dapat belajar. Belajar merupakan kerja sama antara guru, orang tua, dan masyarakat. Karena itu, untuk melaksanakan pendidikan inklusif diperlukan perubahan pola pikir (mindset), penataan secara teknis, kebijakan, budaya, pengelolaan kelas, dan dilakukannya prinsip adaptasi. (Farah Arriani, 2021). Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, dapat disimpulkan beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 2 Palembang: Sikap terbuka dan penerimaan terhadap perbedaan. Kepala sekolah dan para guru memiliki sikap yang terbuka dan menerima keberagaman yang ada pada peserta didik, termasuk siswa berkebutuhan khusus.

Kedua, dukungan dari donatur. Terdapat bantuan berupa beasiswa yang diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus. Salah satu contoh adalah ada salah satu siswa yang berprestasi di bidang tilawatil al-Qur'an menerima penghargaan dari yayasan berupa keringanan pembayaran SPP.

Ketiga, kurikulum yang fleksibel Kurikulum di SMA Muhammadiyah 2 Palembang dirancang fleksibel, menyerupai kurikulum umum, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Siswa kelas 10 dan 11 menggunakan Kurikulum Merdeka sesuai kebijakan pemerintah, sementara siswa kelas 12 masih menerapkan Kurikulum 2013. Pelaksanaan ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, (Permendiknas., 2009) yang mengharuskan satuan pendidikan inklusif untuk menerapkan kurikulum berbasis tingkat satuan pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, bakat, minat, dan potensi setiap siswa.

Namun, di balik faktor pendukung, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam mengelola pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Salah satu hambatan tersebut adalah keterbatasan guru pembimbing khusus (GPK) yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa sekolah ini belum memiliki GPK yang berkompeten di bidang pendidikan luar biasa. Kebijakan kepala sekolah terkait perekrutan GPK belum dapat diwujudkan, sehingga penanganan kebutuhan khusus peserta didik tidak sepenuhnya teridentifikasi, baik oleh kepala sekolah maupun guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 menetapkan bahwa setiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus memiliki minimal satu GPK. Ketiadaan GPK menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, sehingga diperlukan kebijakan yang memastikan keberadaan GPK dengan latar belakang pendidikan luar biasa di sekolah tersebut.

Kepala sekolah sangat mengharapkan kehadiran guru pembimbing khusus yang kompeten, agar pelaksanaan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 2 Palembang dapat berjalan secara maksimal dan sesuai dengan tujuan. Sikap Penerimaan orang tua. Penerimaan terhadap perbedaan adalah elemen mendasar dalam keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif. Tanpa adanya sikap menerima, berbagai kendala dan tantangan dapat muncul dalam upaya mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah. Salah satu hambatan yang kerap terjadi adalah minimnya partisipasi orang tua anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendukung kerja sama dengan pihak sekolah. Meskipun sekolah memiliki guru yang kompeten dalam mengajar ABK, kurangnya perhatian dari orang tua yang terkadang hanya menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada sekolah—dapat menghambat proses pembelajaran. Hal ini menjadi semakin sulit jika anak tersebut belum mandiri, karena guru harus membagi perhatian antara ABK dan siswa lainnya.

Situasi serupa juga ditemukan di SMA Muhammadiyah 2 Palembang, di mana beberapa orang tua siswa masih belum dapat menerima keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus dalam

kelas yang sama dengan anak mereka. Ketidaksiapan menerima perbedaan ini menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tersebut.

Sebagai langkah solutif, kepala sekolah terus berupaya memberikan edukasi kepada para orang tua tentang pentingnya pendidikan inklusif serta pentingnya menghargai keragaman individu dalam lingkungan sekolah. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif, nyaman, dan harmonis bagi semua pihak. Seperti yang disampaikan oleh informan kedua, "Orang tua ABK yang dapat bekerja sama akan sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan inklusif di SMA Muhammadiyah Palembang. Namun, sebaliknya, ada juga orang tua yang kurang kooperatif, yang menyebabkan terhambatnya pendidikan inklusif di sekolah." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang tua merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif.

Keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber belajar yang mendukung Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa sarana, prasarana, dan sumber belajar di SMA Muhammadiyah 2 Palembang belum mencukupi. Sarana dan prasarana di sekolah ini juga belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan sekolah inklusi. Seperti yang dikatakan oleh informan kedua, "Ruangan di sekolah ini bisa digunakan oleh semua murid, tetapi tidak ada fasilitas khusus untuk ABK sesuai dengan kebutuhan khusus mereka." Anak berkebutuhan khusus, yang memiliki latar belakang yang beragam, seharusnya mendapatkan fasilitas yang memadai agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Sekolah seharusnya memiliki ruang khusus yang dapat mendukung pelayanan bagi ABK, seperti ruang bimbingan dan konseling. Namun, hingga saat ini, sekolah belum dapat menyediakan fasilitas tersebut. Akibatnya, untuk mencapai pendidikan inklusif yang berkualitas, perjalanan menuju penyelenggaraan sekolah inklusif yang optimal menjadi lebih panjang dan penuh tantangan. Belum bekerjasama dengan Sekolah Luar Biasa. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, terdapat hambatan yang dihadapi oleh pihak Sekolah dalam melakukan diskusi atau meminta bantuan kepada Sekolah Luar Biasa. Salah satu harapan kepala sekolah adalah membangun kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa, yang mendapatkan dukungan penuh dari seluruh komunitas SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Meskipun SMA Muhammadiyah 2 Palembang telah menerapkan kebijakan pendidikan inklusi dan berupaya menjalankan kebijakan tersebut dengan baik sesuai dengan kapasitas sekolah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar pemerintah dalam menyediakan pendidikan inklusi yang berkualitas untuk anak berkebutuhan khusus (ABK).

Inti dari desain kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah rancangan yang disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Desain ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, terbentuklah sebuah rancangan kebijakan kepala sekolah yang sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Rancangan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung proses penyelenggaraan pendidikan inklusif secara optimal di SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Tujuan ini mencerminkan hasil yang ingin dicapai oleh kepala sekolah dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan, sehingga dapat mendorong pengembangan pendidikan inklusif yang lebih efektif dan efisien. Implementasi kebijakan terkait aspek-aspek yang diamati dalam proses formulasi kebijakan telah dibahas dalam bab tentang peran kepala sekolah dalam pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Pada tahap implementasi, fokus utama adalah pada dukungan, hambatan, dan partisipasi masyarakat sekolah dalam pengambilan kebijakan pendidikan inklusif.

Dukungan terhadap kebijakan ini mencakup sikap positif dari kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki penerimaan tinggi terhadap keberagaman. Sikap penerimaan ini menjadi landasan utama bagi keberlangsungan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Tidak ada diskriminasi yang ditunjukkan oleh kepala sekolah maupun guru, sehingga setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan hak yang sama untuk belajar bersama teman sebayanya. Selain itu, terdapat juga dukungan berupa bantuan beasiswa dari donatur untuk peserta didik berkebutuhan khusus, yang semakin memperkuat pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tersebut.

Kurikulum sekolah yang fleksibel menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus serta potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dinyatakan bahwa satuan pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, bakat, minat, dan potensi peserta didik. Landasan hukum ini menjadi pijakan bagi kepala sekolah dalam merumuskan kebijakan pendidikan inklusif. Selain itu, sarana, prasarana, dan sumber belajar yang mendukung juga menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan sekolah inklusif. Ketersediaan fasilitas yang mudah diakses, terjangkau, dan dapat digunakan oleh seluruh warga sekolah menjadi salah satu pendukung utama bagi kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan pendidikan inklusif.

Namun, terdapat hambatan berupa sikap sebagian orang tua peserta didik tanpa disabilitas yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan pendidikan inklusif. Kekhawatiran dan rasa cemas terhadap penggabungan anak mereka dengan peserta didik berkebutuhan khusus dalam kelompok belajar menjadi tantangan bagi kepala sekolah. Meski demikian, dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif, seluruh komponen sekolah tetap diharapkan berpartisipasi aktif untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut di SMA Muhammadiyah 2 Palembang.

Hasil dari implementasi kebijakan diharapkan memberikan dampak positif bagi individu, masyarakat, dan kelompok, serta menciptakan perubahan dan penerimaan yang lebih luas dari komunitas sekolah terhadap kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil implementasi tersebut, langkah selanjutnya adalah masuk ke tahap evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana proses implementasi telah berjalan sesuai rencana dan apakah tujuan kebijakan telah tercapai. Proses evaluasi ini menjadi alat untuk menentukan keberhasilan atau kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika ditemukan bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan, maka diperlukan perancangan ulang kebijakan yang lebih relevan dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 2 Palembang, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah memainkan peran kunci dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif. Kepala sekolah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang terbuka, inklusif, dan mendukung keberagaman peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif, terdapat beberapa faktor pendukung yang signifikan. Salah satu faktor utama adalah sikap penerimaan yang terbuka dari seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga tenaga kependidikan. Sikap ini menjadi fondasi utama keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Dukungan dari donatur melalui pemberian beasiswa dan kurikulum fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan

individual siswa juga turut mendukung keberhasilan program ini.

Namun, penelitian ini juga mengungkap sejumlah hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Keterbatasan guru pembimbing khusus (GPK) dengan latar belakang pendidikan luar biasa menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya partisipasi dan sikap penerimaan sebagian orang tua siswa juga menjadi tantangan tersendiri. Belum terjalinnya kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa turut memperkompleks upaya pengembangan pendidikan inklusif.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, kepala sekolah telah merancang sebuah desain kebijakan yang komprehensif melalui tiga tahapan utama: formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pendekatan sistematis ini bertujuan untuk terus menerus memperbaiki dan mengembangkan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, mengadakan sarana prasarana khusus, dan memperkuat kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, serta pihak terkait. Hanya melalui pendekatan komprehensif dan kolaboratif inilah pendidikan inklusif dapat benar-benar terwujud secara optimal di SMA Muhammadiyah 2 Palembang.

DAFTAR REFERENSI

- Comas Gatot Haryono. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Dan Komunikasi*. CV Jejak Anggota IKAPI.
- Farah Arriani, D. (2021). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Insklusif*. Kemendikbudristek.
- Khairuddin. (2020). Pendidikan Inklusif Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Tazkiya*, Vol. 9(No. 1), 82–104.
- Khoironi, A. K. dan A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- Permendiknas. (2009). *No 70 tahun 2009. Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Khsusus*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Phytanza, D. T. P., Nur, R. A., Hasyim, Mappaompo, A. M., Rahmi, S., Oualeng, A., Silaban, P. S. M., Suyuti, Iswati, & Rukmini, B. S. (2023). Pendidikan Inklusif: Konsep, Implementasi, dan Tujuan. In *EduHumaniora Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru* (Issue 1). <https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PFAI/article/view/17>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitia Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Taufan, J., & Mazhud, F. (2016). Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah X Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(1). <https://doi.org/10.17509/jpp.v14i1.3213>